

## Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Kota Depok Dalam Pengembangan Situ Sebagai Sarana Ekowisata

Devy Putri Kussanti

Universitas Bina Sarana Informatika/ Fakultas Komunikasi dan Bahasa  
e-mail: devy.dpk@bsi.ac.id

---

**Cara Sitasi:** Kussanti, D. P. (2019). Optimalisasi Peran Humas Pemerintah Kota Depok Dalam Pengembangan Situ Sebagai Sarana Ekowisata. *Cakrawala*, 19(1), 47–54. Retrieved from doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

---

**Abstract** - *As one of the Municipality in West Java Province of Indonesia, Depok has now undergone a very rapid change both in terms of government, economy, commerce and tourism. As a buffer city between Jakarta and Bogor, Depok is often associated with the Megapolitan City in the Jabodetabek area which has a population increase each year, high community activities up to traffic congestion in Jakarta. Judging from this, it is possible that the land in Depok City will also decrease, especially green open land which has benefits for water absorption, noise reduction and the development of a viable environment for nature, culture and the community / residents of Depok City. To overcome the diminishing green open spaces and cultural recreation areas in Depok City, the Government has the idea to develop several natural tourism objects into ecotourism which can be used as a counterweight to the problems of limited environmental quality in Depok City. Depok City Government optimizes at least 4 Situ which is currently being worked on in the context of ecotourism development. Although in terms of implementing the concept of ecotourism it is not as easy and fast as expected, but the Depok City Government has taken its role as much as developing natural tourism products into community-based ecotourism, but still experiences some obstacles from in the government itself, from the community and from the private sector as a wheel of tourism development. This study uses a content-descriptive analysis research method, by studying more information obtained from various reading sources and concluding it into a discourse.*

**Keywords:** *Government Public Relations, Role and Functions of Government Public Relations and Ecotourism.*

### PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Depok maka kebutuhan akan lahan tempat tinggal, sarana dan prasarana serta ketersediaan air bersih pun akan semakin bertambah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang menginginkan tempat tinggal yang layak dengan fasilitas yang mendukung. Perkembangan fasilitas di Kota Depok pun tidak kalah bersaing dengan peningkatan jumlah penduduknya, terdapat beberapa sarana pendidikan seperti sekolah swasta maupun kampus bergengsi di Kota Depok dan disetiap sudut Kota Depok dengan berjarak tidak lebih dari 1 km sudah banyak terlihat bangunan-bangunan tinggi seperti mall, apartemen dan ruko. Dengan ketersediaan berbagai fasilitas yang ada maka tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Depok.

Hal tersebutlah yang menjadi indikator penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Depok. Dimana salah satunya ialah semakin berkurangnya ruang terbuka hijau yang memadai dan memiliki fungsi sebagai paru-paru kota, menjadi area resapan air, meredam kebisingan dan memberikan keteduhan

serta kesejukan. Beberapa hal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan di Kota Depok adalah banyaknya sampah/limbah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat dan pihak pengelola usaha makanan dsbnya.

Karena kondisi tersebutlah, pemerintah Kota Depok hingga saat ini masih tetap berusaha untuk meningkatkan beberapa fungsi dari sarana yang ada di Kota Depok agar dapat dijadikan sebagai ruang terbuka hijau dan lahan resapan air. Adalah Situ atau danau buatan yang awalnya merupakan lahan yang sengaja dibangun untuk area resapan air kini telah bergeser fungsinya sebagai area wisata alam dan dengan semakin berkembangnya dunia pariwisata saat ini maka pemerintah Kota Depok juga sudah mulai mencanangkan kebijakan mengenai Situ sebagai area ekowisata.

Sama halnya dengan wisata alam, ekowisata mengedepankan kekayaan dan keindahan alam sebagai magnet daya tarik agar masyarakat mulai melirik kawasan tersebut. Tetapi konsep yang diusung oleh ekowisata sedikit berbeda, hal ini dikarenakan ekowisata merupakan bentuk wisata

dengan pengelolaan/pemberdayaan lahan dengan konsep konservasi untuk melindungi, mempertahankan dan menjaga keaslian ekosistem di area yang masih alami/asli dan memberi dampak kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Depok mencanangkan akan menjaga beberapa Situ yang ada di wilayahnya agar tetap aman dari pembangunan, seperti perubahan lahan Situ menjadi lahan perumahan, mall ataupun lahan pembuangan sampah masyarakat.

Sedikitnya terdapat empat Situ yang hingga saat ini masih dalam pengembangan secara maksimal kearah ekowisata, diantaranya ialah: Situ Cilangkap, Situ Sidomukti, Situ Cilodong dan Situ Pengasinan. Diharapkan peran yang maksimal dari pemerintah Khususnya Kota Depok dalam mengoptimalkan perubahan fungsi Situ kearah ekowisata. Hal yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Depok adalah bagaimana pemerinta, masyarakat dan pihak swasta dapat bekerjasama dengan baik dalam mengimplementasikan perubahan wisata alam kearah wisata ekologi dan menjaga kelestarian dari konservasi yang ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan Pemerintah Kota Depok sangat menginginkan secara maksimal implementasi dari ekowisata, yang nantinya diharapkan lokasi wisata ekologi tersebut dapat memiliki fungsi ganda, yakni sebagai objek wisata, konservasi alam dan hewan, area resapan air, lahan terbuka hijau, pemasukan ekonomi bagi masyarakat sekitar serta sebagai pendapatan daerah Kota Depok.

### **Humas Pemerintah**

Menurut Gassing dan Suryanto (2016) menyatakan bahwa, "Humas Pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, melainkan dibentuk untuk mempublikasikan kebijakan, rencana, hasil kerja peraturan perundang-undangan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat."

Humas adalah fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerjasama antara organisasi dan publiknya; melibatkan manajemen permasalahan dan isu; membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik; mendefinisikan akan menekankan tanggung jawab manajemen untuk perubahan secara efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah kecenderungan negatif dan menggunakan penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya.(Butterick, 2011)

Berdasarkan dua pemahaman mengenai Humas pemerintah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas pemerintah merupakan salah satu bagian terpenting dari instansi/lembaga yang

bersangkutan, dimana dalam setiap kegiatannya tidak mengandung sisi komersial tetapi lebih kepada pemberian informasi.

### **Tugas, Peran dan Fungsi Humas Pemerintah**

Menurut Harlow dalam Andipate (2015:28) terdapat tugas Humas yaitu:

1. Membantu membentuk dan pemelihara garis komunikasi dua-arah, saling pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan masyarakatnya yang melibatkan manajemen problem atau masalah untuk selalu mendapatkan informasi.
2. Merespon pendapat umum mendefinisikan dan menekankan tanggungjawab manajemen dalam menjalani kepentingan masyarakat.
3. Membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan mengantisipasi kecenderungan riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya.

Dalam melaksanakan perannya, menurut Lattimore (2010) ada empat model humas yang selalu diterapkan. Pertama, model *press agency* (agen pemberitaan); yaitu menggambarkan bagaimana informasi bergerak satu arah dari organisasi menuju publik. Kedua, model informasi publik; yaitu model yang menggambarkan bagaimana humas bertugas memberitahu publik. Model ini selalu dipraktikkan oleh humas pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. Ketiga, model asimetris dua arah; yaitu memandang humas sebagai kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset untuk mengukur dan menilai publik. Keempat, model simetris dua arah; yaitu sebuah model yang menggambarkan sebuah orientasi humas dimana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Model ini berfokus pada penggunaan metode riset ilmu sosial untuk memperoleh rasa saling pengertian serta komunikasi dua arah antara publik dan organisasi. Dari keempat model tersebut, tiga model pertama merefleksikan sebuah praktik humas yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui persuasi. Model keempat berfokus pada usaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau kelompok lainnya. Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkup pemerintahan, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis.(Lubis, 2012)

Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan

berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. (Lubis, 2012)

### **Ruang Terbuka Hijau**

Perlu diperhatikan bahwa ruang publik tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau. Ruang publik yang baik harus dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan beraktivitas dengan aman dan nyaman. Tanpa adanya aktivitas dan interaksi sosial manusia di dalamnya maka suatu ruang publik telah gagal mengemban misinya. Berbeda dengan ruang terbuka hijau, ketika tidak ada aktivitas dan interaksi di dalamnya maka fungsi ruang terbuka hijau masih dapat berlangsung dengan baik. (Dwihatmojo, 2015)

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008). (Dwihatmojo, 2015)

Medcofoundation melalui artikelnya berjudul "Mengenal Ruang Terbuka Hijau" memaparkan mengenai penyediaan RTH yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Masih dalam artikel Mecofoundation, RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis antara lain: paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain: menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain: sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan

kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis. dan konservasi hayati.

### **Pariwisata Berbasis Ekowisata**

Ekowisata Istilah "ekowisata" dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Para pelaku dan pakar di bidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi. Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah: (1) Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (*vs mass tourism*), (2) Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi), (3) Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata), (4) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi), (5) Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi). (Depbudpar, 2009)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 bahwa prinsip pengembangan ekowisata meliputi: (1) kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; (2) konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata; (3) ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan; (4) edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; (5) memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; (6) partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan (7) menampung kearifan lokal. (Hijriati & Mardiana, 2015)

Berdasarkan pemaparan ekowisata diatas, maka dapat

ditarik sebuah definisi bahwa ekowisata merupakan konsep pariwisata alam yang lebih menekankan pada kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap kualitas lingkungan, konservasi, budaya serta memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal mengelola dan meningkatkan perekonomian mereka.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian penyusunan jurnal kali ini penulis menggunakan metode penelitian analisa isi-deskriptif, dimana penelitian menganalisa mengenai isi dari komunikasi yang dilakukan oleh objek penelitian yang berdasarkan pada sumber-sumber bacaan dari berbagai sumber dan melakukan wawancara secara tidak formal kepada beberapa narasumber serta memaparkan secara rinci dan jelas mengenai keadaan yang sebenarnya berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekowisata di Depok.

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan menjadi rekomendasi. Adapun teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui studi dokumen resmi seperti; data yang berasal dari pemerintah Kota Depok, Badan Pusat Statistik Kota Depok dan sebagainya baik yang berasal dari instansi pemerintah, maupun penelusuran di internet yang sesuai dengan cakupan pembahasan. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi pustaka (buku, tinjauan dokumen terhadap literatur yang ada di beberapa perpustakaan perguruan tinggi swasta maupun repository serta jurnal ilmiah dari beberapa perguruan tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peningkatan Masyarakat Kota Depok

Seperti yang telah dipaparkan pada pendahuluan bahwa peningkatan jumlah masyarakat di Kota Depok menjadikan lahan ruang terbuka hijau semakin menurun dalam hal kualitas lingkungannya. Semakin bertambahnya masyarakat maka akan semakin berkurangnya lahan kosong sebagai area resapan air dan area pengembangan keanekaragaman hayati. Hal ini dikarenakan akan meningkatnya permintaan terhadap hunian penduduk baik dalam bentuk perumahan maupun apartemen dan sarana prasarana yang memadai sehingga lahan terbuka hijau akan semakin berkurang.

Selain itu, perkembangan kota Depok sebagai salah satu kota penyangga Jakarta juga merupakan sebuah indikasi meningkatnya pertambahan penduduk di tiap tahunnya. Hampir separuh dari para pekerja Jakarta berdomisili di Depok, hal ini dikarenakan dekatnya wilayah Jakarta dan Depok serta akses kendaraan umum murah meriah seperti dari KRL dan

TransJakarta yang memiliki rute ke daerah Depok. Banyaknya area permukiman atau apartemen, tempat hiburan dan pusat perbelanjaan di Depok pun semakin mempersempit lahan terbuka hijau yang ada. Seperti halnya Jakarta, Depok kini telah menjadi kota yang memiliki intensitas mobilisasi masyarakatnya yang tinggi dari segala kalangan dan status sosialnya.

Berdasarkan data dari Badan Statistik Kota Depok, saat ini jumlah penduduk/masyarakat di Kota Depok semakin bertambah di tiap tahunnya. Berikut tabel jumlah penduduk di Kota Depok pada tahun 2016 dan tahun 2017:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Pada Tahun 2016  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di 11 Kecamatan di Depok sudah mencapai 2.179.813 jiwa dan itupun diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kota Depok dan banyaknya perkembangan di beberapa titik kawasan daerah Depok.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
	2016	2016	2016
Sawangan	78880	76053	154933
Bojongsari	63508	61539	125047
Pancoran Mas	132807	131135	263942
Cipayung	81500	78882	160382
Sukmajaya	144520	146747	291267
Cilodong	79183	77559	156742
Cimanggis	153410	149982	303392
Tapos	136242	134848	271090
Beji	105331	102678	208009
Limo	55823	54452	110275
Cinere	67269	67465	134734
Kota Depok	1098473	1081340	2179813

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Depok Pada Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
	2017	2017	2017
Sawangan	81279	78334	159613
Bojongsari	65473	63421	128894
Pancoran Mas	137438	136009	273447
Cipayung	84046	81315	165361
Sukmajaya	149975	152744	302719
Cilodong	81741	80125	161866
Cimanggis	158734	155253	313987
Tapos	140750	139371	280121
Beji	108925	106290	215215
Limo	57550	56134	113684
Cinere	69628	69978	139606
Kota Depok	1135539	1118974	2254513

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok

Dalam hanya jangka waktu setahun saja (2016-2017), penambahan penduduk di Kota Depok hampir mencapai angka 74.700 jiwa. Hal ini dikarenakan Kota Depok yang merupakan Kota pinggiran tidak begitu jauh letaknya dari Kota Jakarta, banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta tetapi memiliki hunian atau berdomisili di Kota Depok, dikarenakan hunian di Kota Jakarta sudah sangat padat dan sangat mahal. Hal lainnya ialah ketersediaan sarana dan prasarana di Kota Depok yang sudah terbilang lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan bagi penduduknya.

#### Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Depok

Hingga saat ini kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok adalah keterbatasannya ruang terbuka hijau (RTH), pencapaian RTH Kota Depok hanya hampir 16,33 persen dari yang seharusnya disediakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang yakni suatu daerah sedianya memiliki RTH sebanyak 30 persen dari total wilayahnya. Berdasarkan total luas wilayah Kota Depok yakni 202.300 hektare maka seharusnya 20.029 hektare ketersediaan RTH di Kota Depok, tetapi hingga saat ini hanya terdapat 3.271,26 hektare (16,33 persen) RTH yang terdiri dari 10,06 persen luas lahan 2.015,53 hektare RTH publik dan 6,27 persen luas lahan 1.255,73 hektare RTH privat atau milik pengembang. Kondisi tersebut masih jauh dari target yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Depok, yakni setidaknya pencapaian 20 persen ketersediaan

RTH di Kota Depok pada tahun 2018.

Berdasarkan hal diatas maka dapat dikatakan Pemerintah Kota Depok belum maksimal dalam mengelola lahan terbuka hijau dan masih berupaya dengan berbagai cara untuk menjadikan kondisi keterbatasan lahan tersebut dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan potensi wisata alam yang ada sebagai ruang terbuka hijau.

#### Wisata Alam Kota Depok

Dalam bidang pariwisata, Pemerintah Kota Depok lebih memfokuskan pengembangan pada wisata alam dan taman hutan raya (tahura) karena selain sebagai objek wisata kedua jenis pariwisata tersebut memiliki fungsi lainnya yakni sebagai wilayah resapan air, peredam kebisingan, pengembangan pendidikan/penelitian hingga pada pelestarian alam dan budaya.

Wisata alam yang merupakan kegiatan rekreasi dengan memanfaatkan keindahan alam baik yang masih alami maupun buatan (hasil budidaya) diharapkan dapat semakin berkembang sehingga memberikan manfaat tidak hanya untuk wisatawan dan alam itu sendiri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar secara ekonomi.

Khususnya wisata alam, Pemerintah Kota Depok terus melakukan peningkatan dalam memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya. Terdapat beberapa objek wisata alam di Depok yang hingga saat ini masih diminati dan dikunjungi oleh masyarakat, diantaranya ialah Cagar Alam Pancoran Mas/Hutan Kota Depok, Kampung 99 Pepohonan, Studio Alam TVRI, Taman Godong Ijo, Situ Pengasinan, Situ Cilodong dan Pondok Zidane.

Beberapa objek wisata alam yang ada di Kota Depok memang masih memiliki keindahan dan daya tarik bagi masyarakat tetapi hanya semata dalam pemenuhan kebutuhan hiburan saja, belum adanya pengembangan lainnya sebagai fungsi ganda dari adanya wisata alam tersebut. Pemberlakuan mengenai ketersediaan RTH yang memadai di Kota Depok hingga saat ini masih belum terealisasi dan terlihat hanya sekedar wacana. Maka dari itu dibutuhkannya sebuah solusi pengembangan dari objek wisata alam yang sudah ada menjadi sebuah konsep pariwisata baru yang nantinya akan membawa dampak baik bagi lingkungan, wisatawan dan seluruh pelaku pariwisata.

#### Implementasi Ekowisata di Kota Depok

Pariwisata menuju ekowisata merupakan sebuah kemajuan dalam konteks pariwisata secara bertanggungjawab atau peduli terhadap konservasi, alam, lingkungan, budaya dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Secara keseluruhan konsep ekowisata sangat menguntungkan banyak pihak

apabila dijalankan dengan baik dan benar. Dalam hal konsep ekowisata, pihak Kementerian Lingkungan Hidup memberikan batasan setidaknya terdapat 3 komponen yang perlu dikembangkan, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pada awalnya konsep ekowisata, telah lebih dulu diadopsi dan dijalankan di berbagai daerah Indonesia khususnya wilayah Timur Indonesia yang memiliki potensi kaya akan keanekaragaman flora fauna dan kebudayaan lokalnya. Kini, konsep ekowisata sudah mulai dilirik oleh beberapa Kota besar di wilayah Barat Indonesia seperti hutan mangrove PIK di Jakarta, Alam Santosa dan Dusun Bambu di Bandung, Jatisari Seropan di Yogyakarta dan Mangrove Wonorejo di Surabaya serta masih banyak lainnya. Hal inilah yang mendasari Pemerintah Kota Depok pun mulai melirik konsep ekowisata untuk diadopsi guna meningkatkan fungsi dari wisata alam tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi dapat memberikan kontribusi juga bagi segi kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, peningkatan ruang pendidikan dan penelitian mengenai alam dan konservasi, peningkatan segi ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya dan hasil kerajinan masyarakat lokal hingga pada pembelajaran bagi para wisatawan agar lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan keanekaragaman yang ada di area ekowisata. Pemerintah Kota Depok melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Depok beserta sejumlah anggota dari komunitas peduli Sungai Ciliwung Depok sudah menetapkan salah satu wisata alam Kota Depok sebagai objek ekowisata adalah Sungai Ciliwung Depok. Harapan mereka dengan mengusung konsep ekowisata di Sungai Ciliwung Depok ialah ingin mengubah *mindset* masyarakat mengenai fungsi dari Sungai tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah dan mengalih fungsikan sempadannya dari kegiatan/bangunan lainnya menjadi wilayah konservasi keanekaragaman hayati.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga melakukan upaya lainnya yakni dengan mengembangkan beberapa Situ yang berpotensi untuk dijadikan lokasi ekowisata. Saat ini terdapat 26 Situ yang berada di Depok terbilang potensial dijadikan sebagai sarana ekowisata, tetapi Pemerintah hanya menargetkan 4 Situ yang akan digarap terlebih dahulu, diantaranya ialah Situ Cilangkap, Situ Sidomukti, Situ Cilodong dan Situ Pengasinan. Setelah itu Pemerintah telah mengagendakan akan mengadakan kegiatan *tour de situ* sebagai bagian dari publikasi Situ sebagai objek ekowisata.

Terdapat beberapa kendala dalam implementasi ekowisata di Kota Depok diantaranya ialah (1) kurangnya ketersediaan lahan asli, dimana saat ini implementasi diusahakan pada lahan buatan yakni Sempadan di sekitar Sungai Ciliwung Depok, Situ

dan Taman Kota, (2) Pemerintah masih belum terlihat serius dalam mengelola pengembangan ekowisata, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya ketersediaan RTH sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yakni 30 persen dari luas wilayah Kota, (3) Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mengenai konsep ekowisata, karena sosialisasi dan pendidikan mengenai ekowisata yang tidak maksimal, (4) Kurangnya peran pihak swasta dalam membantu proses publikasi kawasan ekowisata di Kota Depok, (5) Akses menuju lokasi ekowisata yang terbatas.

Dengan adanya beberapa kendala diatas, diharapkan adanya optimalisasi peran dan fungsi dari Pemerintah Kota Depok sebagai fasilitator dan pen jembatan komunikasi antara para pelaku ekowisata untuk memaksimalkan implementasi konsep ekowisata pada beberapa destinasi wisata alam di Kota Depok.

Adapun pelaku-pelaku dari ekowisata adalah:

### 1. Pemerintah

Melalui konsep ekowisata, pemerintah ingin memunculkan sudut kepedulian terhadap lingkungan alam dan potensi ekonomi masyarakat setempat/lokal. Dalam hal ini pemerintah Kota Depok berperan sebagai pen jembatan dan pemberi regulasi yang sekiranya dapat memudahkan realisasi dari konsep ekowisata. Peran pemerintah dalam pengembangan ekowisata antara lain bekerjasama dengan masyarakat dan pihak swasta dalam hal implementasi ekowisata di Kota Depok. Tindakan lainnya adalah dengan memberikan informasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep ekowisata yang baik dan benar, karena masih banyak masyarakat yang kurang faham tentang apa dan bagaimana ekowisata. Pemberian informasi dan sosialisasi juga dilakukan pada masyarakat lokal agar lebih aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan ekowisata agar berjalan dengan semestinya.

### 2. Pihak Swasta

Dalam mewujudkan ekowisata yang maksimal dan berdaya tarik bagi masyarakat luas, dibutuhkan dana yang tidak sedikit, hal inilah yang mendasari Pemerintah Kota Depok menggandeng pihak swasta sebagai *partner* dalam mengembangkan sektor ekowisata melalui penyediaan infrastruktur yang memadai bagi wisatawan. Peran pihak swasta bagi implementasi ekowisata di Kota Depok juga dapat berupa partner pendukung dengan memberikan *space* media publikasi melalui media massa baik media elektronik maupun media cetak serta publikasi pada media sosial ataupun penempatan objek ekowisata dalam pilihan destinasi pihak *tour and travel*.

Selain sebagai donatur pengembangan infrastruktur, pihak swasta yang notabeneanya memiliki tingkat profesional tinggi dalam hal dunia pariwisata

diberikan kewenangan dalam pengelolaan dan manajemen wisata. Maka disini, dapat dikatakan pihak swasta tidak hanya sebagai investor, tetapi bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat mengelola dan mengatasi kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan ekowisata.

### **3. Masyarakat Lokal**

Selain sebagai salah satu pelaku dalam menjalankan ekowisata, masyarakat juga diharuskan untuk mengetahui dan memahami hakekat dari ekowisata. Pendidikan dan pengetahuan yang maksimal mengenai konsep ekowisata merupakan suatu faktor dalam mempercepat realisasi ekowisata.

Dalam hal memberikan kontribusi guna realisasi ekowisata di Kota Depok, masyarakat memang harus diberikan informasi dan pemahaman yang baik dan benar mengenai konsep pariwisata berbasis ekowisata. Disini, masyarakat yang memang sudah memiliki kemampuan dan kreatifitas dalam bidang kuliner ataupun kerajinan tangan diberikan pemahaman untuk mengolah kemampuan mereka sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh Kota Depok. Kita ketahui bahwa Belimbing merupakan ikon Kota Depok, maka pengelola bidang kuliner sedapat mungkin menghasilkan berbagai macam makanan ataupun minuman dengan bahan baku buah belimbing, seperti dodol belimbing, manisan belimbing, keripik belimbing, jus belimbing, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi pengerajin diharapkan dapat membuat kerajinan tangan yang mewakili dari karakteristik Kota Depok, seperti lonceng angin/genteng nada (hal ini dikarenakan Depok merupakan salah satu Kota dengan intensitas angin yang cukup kencang), tas rotan, curug genteng (miniatur air terjun di dalam genteng-hal ini dikarenakan daerah Depok banyak terdapat curug), sulam perca hingga berbagai souvenir lainnya baik dalam bentuk kecil maupun besar serta bergambar buah belimbing ataupun motif batik.

## **Kepentingan Pemerintah Kota Depok dalam Pengembangan Situ sebagai Sarana Ekowisata**

### **1. Konservasi Alam**

Implementasi konsep ekowisata selain merupakan cara yang ramah dalam melakukan perjalanan ataupun kegiatan berwisata, juga memberikan manfaat di bidang konservasi alam yang selanjutnya akan membawa dampak keberlangsungan ekosistem flora dan fauna yang ada di area ekowisata. Dengan adanya konservasi alam di Kota Depok, diharapkan kedepannya tidak hanya mall tempat pengisi liburan bagi keluarga tetapi objek ekowisata pun dapat dijadikan alternative yang cerdas dalam mengajak anak-anak untuk lebih mengenal alam dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.

### **2. Pendidikan dan Penelitian**

Dengan adanya konsep ekowisata, pihak perseorangan yang ingin melakukan penelitian,

instansi pendidikan dan penelitian baik pemerintah maupun swasta pun mendapatkan peluang yang cukup besar dalam hal mengembangkan penelitiannya. Jika dilihat dari cakupan keberadaannya, Kota Depok merupakan salah satu Kota yang dikelilingi oleh beberapa instansi pendidikan, salah satunya ialah Universitas Indonesia.

### **3. Peluang Ekonomi dan Investasi**

Dalam pengembangan pariwisata kearah ekowisata di Kota Depok terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yakni keterbatasan dan ketidakmerataan sarana dan prasarana pendukung. Dimana letak dari 4 Situ masih sangat minim akan akses jalan yang memadai. Tetapi dengan adanya peran dari pihak swasta kemungkinan akan pengembangan akses jalan menuju destinasi ekowisata akan semakin membaik sehingga nantinya wisatawan akan lebih tertarik untuk mengunjungi destinasi ekowisata di Kota Depok. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai dan kesan yang baik dari wisatawan yang pernah berkunjung maka tidak dipungkiri jika wisatawan akan semakin bertambah dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pihak swasta dan pendapatan pemerintah pun akan semakin bertambah.

## **KESIMPULAN**

Kota Depok dengan segala kemajuannya telah membawa dampak yang kurang baik juga dalam hal kualitas lingkungan. Hal inilah yang mendasari implementasi ekowisata di Kota Depok, dengan memanfaatkan objek wisata alam yang sudah ada dan kemudian dikembangkan dengan konsep ekowisata. Pemerintah sangat berharap banyak bahwa dengan implementasi ekowisata maka akan membawa dampak yang lebih baik dari segi penyediaan daerah resapan air, konservasi alam, pengembangan ekologi bagi pendidikan dan penelitian, peningkatan segi ekonomi bagi masyarakat lokal hingga pada kesadaran masyarakat dan wisatawan bahwa lingkungan harus dijaga dengan baik sehingga nantinya mereka pun akan dijaga oleh lingkungan.

Sebagai salah satu dari pelaku ekowisata, Pemerintah Kota Depok juga sangat membutuhkan bantuan dari pelaku ekowisata lainnya, seperti pihak swasta, masyarakat dan wisatawan yang melakukan wisata. Hal ini untuk lebih mendalami konsep ekowisata yang berbasis masyarakat. Sebagai Kota yang semakin berkembang dan padat, maka pengadaan pariwisata dengan konsep ekowisata dirasa sulit untuk direalisasikan oleh Kota Depok. Maka dari itu Pemerintah mengoptimalkan wisata alam yang sudah ada menjadi objek wisata berkonsep ekowisata.

Salah satu wisata alam di Kota Depok yang sudah mulai mengadopsi konsep ekowisata ialah Sungai Ciliwung Depok dan akan disusul oleh Situ Cilangkap, Situ Sidomukti, Situ Cilodong dan Situ

Pengasinan. Pengembangan dari beberapa Situ dari wisata alam menjadi objek ekowisata pun mengalami beberapa kendala yang cukup sulit, hanya saja hingga saat ini Pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan hal tersebut dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai aparat Negara yang baik tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi kualitas lingkungan di Kota Depok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Depok, baik dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat lokal masih harus meningkatkan perannya masing-masing dalam mengimplementasikan ekowisata, merumuskan standarisasi ekowisata, memperbanyak sosialisasi tentang ekowisata, memberikan penghargaan bagi pihak atau daerah yang memiliki peran serta tinggi terhadap pengembangan ekowisata beserta sumber daya alam dan manusianya. Sehingga tercapai tujuan dan maksud dari pengembangan konsep ekowisata di Kota Depok.

#### REFERENSI

- Andipate Anwar Arifin. (2015). Paradigma Baru Public Relations Teori, Strategi dan Riset, Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Butterick, K. (2011). *Introducing Public Relations: Theory and Practice: Live*.  
<https://doi.org/10.13203/j.whugis2013.10.020>
- Depbudpar. (2009). Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat. *Ekowisata*, 1–9.
- Dwihatmojo, R. (2015). Kajian Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. *Tesis*. Retrieved from [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=81050&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=81050&obyek_id=4)
- Gassing dan Suryanto. 2016. *Public Relations*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Hijriati, E., & Mardiana, R. (2015). PENGARUH EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKOLOGI, SOSIAL DAN EKONOMI DI KAMPUNG BATUSUHUNAN, SUKABUMI. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3).  
<https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9422>
- Lubis, E. E. (2012). Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 51–60.  
<http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>  
<https://www.google.com/amp/wartakota.tribunnews.com/amp/2018/02/22/komunitas-ciliwung-depok-dorong-taman-edukasi-dan-area-konservasi-ada-di-sempadan-sungai>  
<https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp>

/841583/empat-situ-di-depok-bakal-jadi-tempat-wisata

#### PROFILE PENULIS

**Devy Putri Kussanti, S.Sos, M.Si.** Lahir di Jakarta, 13 Desember 1983. Tinggal di Tambun, Bekasi. Profesi sebagai Dosen Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta Program Studi Hubungan Masyarakat, yang beralamat di UBSI Pemuda, Jalan Kayu Jati 5, Rawamangun, Jakarta Timur